

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Pariwisata merupakan sektor strategis yang memiliki peran penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi, membuka lapangan pekerjaan, serta menjadi wadah untuk mempromosikan budaya dan identitas lokal. Di banyak negara, sektor ini menjadi tulang punggung ekonomi, menciptakan *multiple effect* pada berbagai sektor lain, seperti transportasi, akomodasi, dan makanan. Kontribusi pariwisata terhadap ekonomi global cukup signifikan. Data dari World Travel & Tourism Council (WTTC) menunjukkan sektor ini menyumbang sebanyak 10,4% terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) dunia pada 2019, meskipun sempat menurun akibat pandemi Covid-19.<sup>1</sup> Saat ini, pariwisata menjadi salah satu sektor strategis yang mempromosikan pembangunan berkelanjutan.

Pada tahun 2019, sektor pariwisata berada dalam kondisi puncak sebelum pandemi Covid-19, menyumbang lebih dari 10% terhadap PDB global. Di tahun 2020, pandemi menyebabkan penurunan drastis kontribusi pariwisata terhadap ekonomi global akibat pembatasan perjalanan internasional. Tahun selanjutnya, 2021 upaya pemulihan dimulai, dengan melonggarkan pembatasan perjalanan dan dilaksanakannya vaksinasi global. Dua tahun kemudian, pemulihan signifikan terlihat dengan peningkatan wisatawan internasional sebesar 48%. industri pariwisata hampir

---

<sup>1</sup> World Travel & Tourism Council (WTTC). (2020). The Economic Impact of Travel & Tourism 2020. WTTC.

kembali ke kondisi pra-pandemi, dengan meningkatkan kontribusi ekonomi dan lapangan kerja.

**Tabel 1. 1**

**Dampak Pariwisata terhadap Ekonomi Global (2019-2024)**

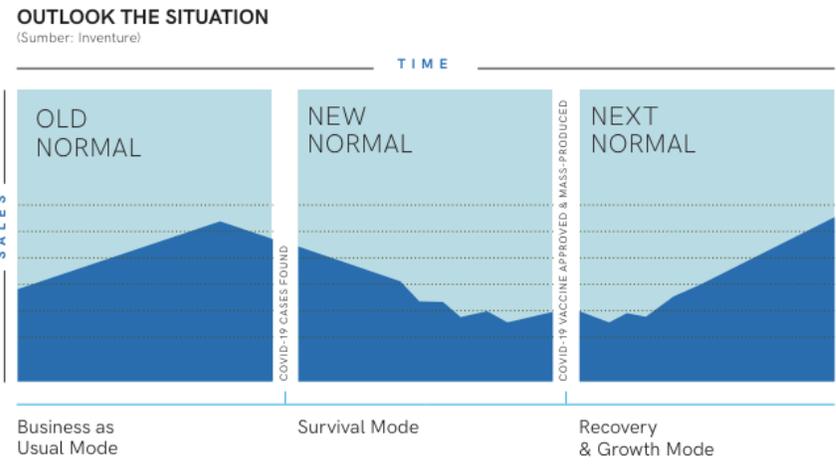
Tahun	Kontribusi terhadap PDB Global (%)	Kontribusi terhadap lapangan kerja (%)	Jumlah wisatawan internasional (juta)	Pendapatan pariwisata Global (USD Triliun)
2019	10,4	10,3	1.5	8,9
2020	4,7	6,3	0.4	1,4
2021	6,1	7,5	0.8	3,4
2022	7,6	9,3	1.0	5,7
2023	8,3	9,5	1.2	6,8
2024	9,0	9,8	1.3	7,5

*Sumber: World Travel & Tourism Council (WWTC), United Nations World Tourism Organization (UNWTO), Global Economic Monitor (2024)*

Pendapatan yang diperoleh dari hasil pariwisata termasuk belanja wisatawan domestik dan internasional terus meningkat setelah penurunan tajam pada tahun 2020. Pada tahun 2024, pendapatan global dari pariwisata diperkirakan naik mencapai 7.5 triliun US. Jumlah wisatawan internasional pun diperkirakan naik pada tahun 2024 melihat lonjakan jumlah wisatawan internasional kembali ke angka 1,3 miliar setelah penurunan drastis pada 2020.

Gambar 1.1 menampilkan grafik yang menggambarkan situasi pariwisata dari sebelum pandemi, selama pandemi, hingga masa pemulihan menuju era *new normal* dan seterusnya. Grafik ini terbagi menjadi tiga fase utama berdasarkan waktu. *Old normal* memperlihatkan situasi pariwisata berjalan secara normal tanpa gangguan,

dengan tren pertumbuhan yang stabil. Sektor pariwisata berada pada kondisi optimal dengan pendapatan yang konsisten. Fase *new normal* menunjukkan dampak pandemi terhadap sektor pariwisata. Grafik mengalami penurunan signifikan, yang menunjukkan bahwa sektor pariwisata berada dalam *survival mode*. Periode ini ditandai dengan pembatasan aktivitas masyarakat, pengurangan mobilitas, dan penurunan permintaan wisata akibat dampak pandemi.



Sumber: Buku *Tren Pariwisata 2023*

Pada fase *next normal*, grafik mulai menunjukkan pemulihan dan pertumbuhan. Ini mencerminkan langkah pemulihan yang dilakukan pemerintah dan pelaku industri pariwisata untuk meningkatkan aktivitas sektor ini. Pemulihan mulai terlihat pada tahun 2022 dengan pelonggaran pembatasan dan pandemi yang semakin terkendali.

Momentum pemulihan berada pada tahun 2022 harus dimanfaatkan dengan baik. Pelonggaran aktivitas masyarakat yang dilakukan bertahap sepanjang awal tahun 2022, hingga pandemi yang mulai terkendali bisa menjadi katalis kebangkitan aktivitas ekonomi khususnya di bidang industri pariwisata dan ekonomi kreatif yang cukup menurun sepanjang dua tahun terakhir sebagai akibat dari pembatasan aktivitas sosial.<sup>2</sup>

Indonesia, dengan kekayaan alam dan budaya yang beragam, telah lama dikenal sebagai destinasi wisata dunia. Sektor pariwisata sendiri memiliki peran penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi di Indonesia, karna bisa membuka lapangan kerja dan meningkatkan kesejahteraan rakyat.

**Tabel 1. 2**  
**Kontribusi Sektor Pariwisata terhadap Produk Domestik Bruto (PDB)**  
**Indonesia Tahun 2019-2023**

Tahun	Kontribusi terhadap PDB (%)
2019	4.7
2020	4.0
2021	4.0
2022	4.3
2023	4.1

*Sumber: olahan peneliti, dari Badan Pusat Statistik (BPS) dan Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Kemenparekraf) 2024*

Data BPS menunjukkan penurunan signifikan pada kontribusi sektor pariwisata terhadap PDB pada tahun 2020 akibat pandemic Covid-19. Namun, pemerintah

<sup>2</sup> Buku Tren Pariwisata 2023

optimis sektor ini akan pulih dan menargetkan kontribusi sebesar 4,6% pada tahun 2025, dengan devisa pariwisata mencapai USD 22,10 miliar.<sup>3</sup>

Indonesia, sebagai negara kepulauan terbesar memiliki potensi pariwisata yang luar biasa, pariwisata menjadi penyumbang devisa terbesar setelah sektor migas dan kelapa sawit. Dengan lebih dari 17.000 pulau dan berbagai warisan budaya, Indonesia menarik jutaan wisatawan setiap tahunnya. Menurut *Travel & Tourism Development Index (TTDI) 2024* yang dirilis oleh *World Economic Forum*, Indonesia saat ini berada di peringkat ke-22 dari 119 negara, naik 10 peringkat dari posisi sebelumnya. Posisi ini menempatkan Indonesia di posisi kedua tertinggi di ASEAN, mengungguli Malaysia dan Thailand. Peringkat ini mencerminkan upaya pemerintah dalam mempromosikan destinasi unggulan, seperti Bali, Borobudur, dan Danau Toba yang dikenal sebagai destinasi super prioritas.

Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Kemenparekraf) Indonesia menyatakan bahwa sektor ini memberikan kontribusi signifikan PDB. Indonesia dengan meningkatkan jumlah kunjungan wisatawan yang terus berkembang. Pada tahun 2019, Indonesia mencatatkan sekitar 16 juta kedatangan wisatawan mancanegara, sektor pariwisata berkontribusi sekitar 4,5% terhadap PDB nasional. Namun sektor ini mengalami penurunan tajam pada 2020 karena pengaruh dari pandemi, menyebabkan penurunan jumlah kunjungan wisatawan hingga 70%.

---

<sup>3</sup> Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif. (2023). Siaran Pers: Kemenparekraf Promosikan Bangsa Berwisata di Indonesia Lewat DIATF 2024. Diakses pada (15 November 2024), dari <https://www.kemenparekraf.go.id/berita/siaran-pers-kemenparekraf-promosikan-bangsa-berwisata-di-indonesia-lewat-diatf-2024>

Meskipun demikian, sejak tahun 2021, sektor pariwisata mulai terlihat tanda pemulihan seiring dengan dilakukannya vaksinasi dan pembukaan kembali destinasi wisata menggunakan protokol kesehatan yang ketat. <sup>4</sup>

Berikut adalah tabel yang menunjukkan perkembangan jumlah wisatawan mancanegara yang datang ke Indonesia, serta kontribusi sektor pariwisata terhadap PDB nasional selama periode 2019-2024.



**Tabel 1. 3**

**Perkembangan jumlah wisatawan mancanegara indonesia dan kontribusi sektor pariwisata terhadap PDB Nasional periode 2019-2023**

Tahun	Jumlah Wisatawan Mancanegara (Juta)	Kontribusi Pariwisata terhadap PDB (%)
2019	16,11	4,5
2020	4,02	2,9
2021	1,6	2,3
2022	5,2	3,6
2023	7,5	4,0

*Sumber: olahan peneliti berdasarkan, Kemenparekraf “Laporan Tahunan 2020” dan Pemulihan Pariwisata 2021.” dan Badan Pusat Statistik (BPS), “Statistik Pariwisata Indonesia 2020-2024.*

Keberhasilan sektor pariwisata Indonesia dalam mengatasi dampak pandemi sebagian besar ditentukan oleh kebijakan pemerintah yang tepat, seperti penerapan protokol kesehatan yang ketat, serta promosi pariwisata domestik yang dimulai sejak akhir 2020. pada tahun 2021, Kemenparekraf fokus pada pengembangan “pariwisata berbasis desa” atau desa wisata untuk memperkenalkan destinasi wisata baru yang kurang terdampak oleh krisis. Selain itu, promosi pariwisata digital yang

<sup>4</sup> Kemenparekraf, 2020.

mengandalkan *platform online* semakin diperkuat, sehingga wisatawan dapat memesan tiket secara daring, meningkatkan sektor sektor pariwisata meskipun pembatasan perjalanan masih berlaku.

Dalam pengembangan pariwisata, keberlanjutan menjadi prinsip utama dalam pelaksanaannya. Menurut Undang-Undang No. 10 Tahun 2009 tentang kepariwisataan, pemerintah diwajibkan untuk menyelenggarakan pariwisata yang berorientasi pada keberlanjutan ekonomi, sosial, dan lingkungan. Dalam konteks ini, Indonesia mengembangkan berbagai destinasi wisata yang memprioritaskan kelestarian alam dan budaya. Dalam rangka meningkatkan daya saing pariwisata, pemerintah Indonesia telah mencangkan berbagai kebijakan strategis, salah satunya melalui pengembangan Destinasi Pariwisata Super Prioritas (DPSP). selain meningkatkan daya saing, program ini juga bertujuan untuk mengembangkan destinasi wisata yang lebih terkelola dengan baik dan mendatangkan manfaat ekonomi bagi masyarakat setempat tanpa merusak lingkungan.

Program ini mencakup lima destinasi utama, yaitu Danau Toba, Borobudur, Mandalika, dan Labuan Bajo. Pada tahun 2023, pemerintah Indonesia menargetkan sektor pariwisata dapat kembali ke jalur pertumbuhannya sebelum pandemi, dengan mengandalkan destinasi wisata yang lebih ramah lingkungan dan terdiversifikasi. Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Kemenparekraf) menargetkan kontribusi sektor pariwisata mencapai 4,4% terhadap PDB, dengan meningkatkan

kunjungan wisatawan mancanegara menjadi 8,5 juta jiwa dan wisatawan domestik mencapai 1,2 miliar perjalanan.

Dari sisi anggaran, pemerintah mengalokasikan dana melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) untuk mendukung pengembangan sektor pariwisata. Berdasarkan data kementerian keuangan, pada tahun 2023 anggaran untuk fungsi pariwisata dialokasikan sebesar Rp3,56 triliun, sebagian besar difokuskan pada peningkatan infrastruktur, pengembangan destinasi wisata, serta promosi pariwisata nasional. Selain itu, Transfer ke Daerah (TKD) melalui Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik Bidang Pariwisata juga terus ditingkatkan dari Rp0,31 triliun pada tahun 2022 menjadi Rp0,45 triliun pada tahun 2023. dana ini digunakan untuk pembangunan fasilitas di 81 Daya Tarik Wisata (DTW) di berbagai wilayah Indonesia.<sup>5</sup>

Namun, meskipun upaya pengembangan telah dilakukan, masih ditemukan berbagai tantangan dalam pengembangan sektor pariwisata di Indonesia. Salah satunya adalah rendahnya efektivitas pelaksanaan kebijakan akibat lemahnya koordinasi antarlembaga pemerintah. Selain itu, keterbatasan infrastruktur, kualitas sumber daya manusia di sektor pariwisata, dan pengelolaan anggaran yang belum optimal juga menjadi kendala utama. Sebagai contoh, pengelolaan beberapa DPSP menghadapi masalah seperti keterlambatan pembangunan infrastruktur, kurangnya promosi destinasi, serta minimnya partisipasi masyarakat lokal dalam pengembangan pariwisata.

---

<sup>5</sup> Kementerian Keuangan, "APBN Dukung Kebangkitan Pariwisata Indonesia." diperoleh dari <https://mediakeuangan.kemenkeu.go.id>

Dalam konteks ini, kapasitas pemerintah menjadi faktor kunci untuk menentukan keberhasilan pengembangan sektor pariwisata. Kapasitas tersebut meliputi kemampuan pemerintah dalam merumuskan kebijakan yang tepat, mengelola sumberdaya secara efisien, serta menjalin kemitraan dengan berbagai pihak, termasuk sektor swasta dan masyarakat.

Di Provinsi Sumatera Barat, pariwisata menjadi salah satu sektor unggulan yang diharapkan juga dapat meningkatkan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). Keanekaragaman budaya, keindahan alam, serta warisan sejarah yang kaya menjadikan Sumatera Barat sebagai destinasi wisata potensial. Kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB Sumatera Barat menunjukkan hasil yang positif. Dari data Badan Pusat Statistik (BPS) Sumatera Barat menunjukkan bahwa pada tahun 2020, sektor pariwisata menyumbang sekitar 1,2% terhadap PDRB Kota Padang, dengan nilai Rp745.82 miliar.<sup>6</sup> Meskipun persentase ini terlihat kecil, namun dampak multifikasi sektor pariwisata terhadap perekonomian daerah cukup signifikan.

Pemerintah Sumatera Barat menyadari pentingnya pengembangan sektor pariwisata dan telah mengalokasikan anggaran khusus untuk mendukung pengembangan tersebut. Pada tahun 2023, Pemprov Sumbar mengucur dana Rp11,3 miliar melalui skema Bantuan Keuangan Khusus (BKK) untuk pengembangan pariwisata di enam kabupaten dan kota, yaitu Tanah Datar, Sijunjung, Pasaman,

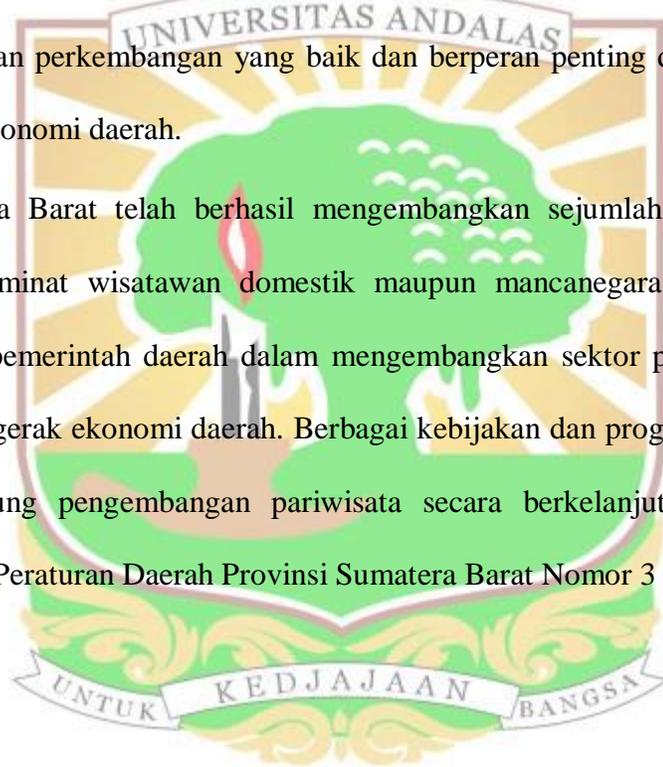
---

<sup>6</sup> Pemerintah Daerah Kota Padang. "Pariwisata dalam Perspektif Statistik". diperoleh dari <https://www.padang.go.id/pariwisata-dalam-perspektif-statistik>.

Agam, Sawahlunto, dan Pariaman. Total anggaran yang dikeluarkan mencapai angka Rp29,5 miliar, termasuk kontribusi dari pemerintah kabupaten/kota.<sup>7</sup>

Pendanaan BKK ini melibatkan kontribusi 40% dari pemerintah provinsi dan 60% dari pemerintah daerah. Sumatera Barat dengan kekayaan budaya Minangkabau, keindahan alam, serta kuliner khas yang mendunia, memiliki potensi besar, untuk menjadi destinasi wisata unggulan di Indonesia. Sektor pariwisata Sumatera barat terus menunjukkan perkembangan yang baik dan berperan penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi daerah.

Sumatera Barat telah berhasil mengembangkan sejumlah destinasi wisata yang menarik minat wisatawan domestik maupun mancanegara. Hal ini sejalan dengan upaya pemerintah daerah dalam mengembangkan sektor pariwisata sebagai salah satu penggerak ekonomi daerah. Berbagai kebijakan dan program telah disusun untuk mendukung pengembangan pariwisata secara berkelanjutan, seperti yang tertuang dalam Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 3 Tahun 2014.



---

<sup>7</sup> Antara News Sumbar. (2023). Sumbar Kucurkan Rp11,3 miliar kembangkan pariwisata daerah pada 2023. diperoleh dari <https://sumbar.antarane.ws.com/berita/593010/sumbar-kucurkan-rp113-miliar-kembangkan-pariwisata-daerah-pada-2023>.

**Tabel 1. 4**

**Kunjungan Wisatawan Pada Daya Tarik Wisata (DTW) Berbayar Menurut  
Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Barat (orang)  
Tahun 2020–2023**

Kabupaten/Kota	Kunjungan Wisatawan Nusantara Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Barat (orang)			
	2020	2021	2022	2023
Kab. Kepulauan Mentawai	122.793	318	5	14
Kab. Pesisir Selatan	177.017	354.297	212.881	1.316.340
Kab. Solok	703.649	703.300	568.143	1.669.161
Kab. Sijunjung	149.889	60.533	122.013	241.236
Kab. Tanah Datar	527.635	340.363	642.717	1.108.151
Kab. Padang Pariaman	261.615	100.144	245.002	227.131
Kab. Agam	664.318	509.428	83.002	58.410
Kab. Lima Puluh Kota	654.334	624.155	749.034	630.226
Kab. Pasaman	747	11.812	20.175	13. 875
Kab. Solok Selatan	41.809	61.199	167.997	93.521
Kab. Dharmasraya	11.676	54.908	126.596	178.499
Kab. Pasaman Barat	2.486	23.503	433.405	391.999
Kota Padang	2.621.929	376.534	681.689	1.199. 833
Kota Solok	134.450	181.154	100.373	217.252
Kota Sawahlunto	101.649	91.027	11.026	254.396
Kota Padang Panjang	107.642	215.073	261.044	254.985
Kota Bukittinggi	1.471.542	748.074	1.231.306	1.161. 812
Kota Payakumbuh	46.930	77.747	48.384	35.181
Kota Pariaman	239.758	252.317	209.003	2.181.157
Provinsi Sumatera Barat	8.041.868	4.785.886	5.913.795	11.234.179

*Sumber: olahan peneliti, dari BPS Sumatera Barat, dan Dinas Pariwisata Sumatera Barat tahun 2024*

Tabel 1.4 diatas memperlihatkan jumlah kunjungan wisatawan ke masng kabupaten/kota di Sumatera Barat, dan Kota Padang merupakan salah satu kota yang paling banyak dikunjungi oleh wisatawan baik domestik maupun mancanegara. Kota Padang sebagai ibukota provinsi, berperan penting dalam mendukung pengembangan

sektor pariwisata di Sumatera Barat. Pariwisata menjadi salah satu sektor utama yang ingin dikembangkan oleh Pemerintah Daerah Kota Padang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) tahun 2019-2024.

Kota Padang memiliki potensi wisata yang cukup besar, terutama dari sektor wisata bahari, budaya, sejarah, dan kuliner. Dengan potensi ini, pemerintah ingin menjadikan Kota Padang sebagai destinasi wisata unggulan yang nyaman dan berkesan bagi wisatawan, baik domestik maupun mancanegara.

Selama beberapa tahun terakhir, geliat pariwisata di Kota Padang semakin meningkat. Hal ini ditandai dengan bertambahnya jumlah kunjungan wisatawan serta berkembangnya infrastruktur pendukung, seperti hotel, restoran, dan sarana transportasi. Namun, masih banyak aspek yang perlu diperbaiki, terutama dalam pengelolaan destinasi, promosi, dan peningkatan kualitas layanan. Oleh karena itu, dalam RPJMD 2019-2024, terdapat berbagai strategi yang dirancang untuk mendorong pertumbuhan sektor ini.

Tujuan utama pengembangan pariwisata dalam RPJMD ini adalah meningkatkan daya tarik wisata Kota Padang melalui pembenahan infrastruktur dan perbaikan manajemen destinasi, serta memaksimalkan potensi wisata berbasis budaya dan kearifan lokal agar wisatawan tidak hanya menikmati keindahan alam, tetapi juga mendapatkan pengalaman wisata kearifan budaya lokal.

Pengembangan sektor pariwisata di Kota Padang didasarkan pada berbagai regulasi yang berlaku secara nasional, provinsi, hingga tingkat kota. Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 50 Tahun 2011 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Nasional (RIPPARNAS) menjadi pedoman utama dalam pengembangan pariwisata di Indonesia. Peraturan ini mencakup aspek destinasi, pemasaran, industri, serta kelembagaan kepariwisataan, sehingga kebijakan pariwisata Kota Padang harus selaras dengan strategi nasional dalam meningkatkan daya saing destinasi, pembangunan infrastruktur, serta pemberdayaan masyarakat lokal. Di tingkat provinsi, Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 3 Tahun 2014 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Daerah (RIPPDA) Sumatera Barat Tahun 2014-2025 menjadi acuan dalam perencanaan dan pengelolaan sektor pariwisata. Regulasi ini menggarisbawahi pentingnya pariwisata berbasis budaya dan alam sebagai daya tarik utama Sumatera Barat, dimana Kota Padang memiliki peran strategis sebagai salah satu destinasi utama yang dikembangkan.

Dalam konteks pengelolaan tata ruang, Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 3 Tahun 2019 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Padang Tahun 2010-2030 berfungsi sebagai dasar dalam pengaturan kawasan wisata di kota ini. Regulasi ini memastikan bahwa pengembangan sektor pariwisata tetap memperhatikan aspek keberlanjutan dan kelestarian lingkungan sesuai dengan perencanaan tata ruang yang telah ditetapkan. Selain itu, Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 6 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah

Daerah (RPJMD) Kota Padang Tahun 2019-2024 menetapkan pariwisata sebagai salah satu prioritas pembangunan daerah guna meningkatkan pertumbuhan ekonomi serta memperkuat daya tarik wisata Kota Padang.

Pada akhirnya, pengembangan sektor pariwisata ini bertujuan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi daerah, meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD), serta membuka lebih banyak lapangan pekerjaan bagi masyarakat. Sebagai langkah awal, pemerintah telah menetapkan sejumlah destinasi unggulan yang akan menjadi prioritas pengembangan. Beberapa di antaranya adalah Pantai Padang, Gunung Padang, kawasan wisata Kota Tua, serta pulau-pulau kecil di sekitar Kota Padang. Selain itu, pengembangan pariwisata berbasis komunitas juga masuk dalam perencanaan, seperti pengembangan kampung tematik dan agrowisata.

Pemilihan tema pariwisata juga didasarkan pada kontribusi sektor ini terhadap pembangunan daerah. Sektor pariwisata termasuk salah satu sektor prioritas untuk program pengembangan di Kota Padang, hal ini tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) tahun 2019-2024. Berdasarkan laporan dari Dinas Pariwisata Kota Padang tahun 2022, sektor pariwisata menyumbang lebih dari 15% terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Padang. Sektor ini juga mampu menciptakan lapangan kerja baru bagi masyarakat lokal, terutama di bidang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), pengelolaan *homestay*, dan jasa transportasi. Namun pengembangan sektor pariwisata di Sumatera Barat khususnya di kota Padang, masih menghadapi berbagai tantangan. Beberapa

tantangan yang dihadapi, seperti infrastruktur pendukung pariwisata yang belum optimal, kurangnya promosi yang terarah, serta koordinasi antara pihak terkait menjadi kendala yang mempengaruhi daya saing pariwisata daerah. Kota Padang sebagai pusat ekonomi dan budaya di Sumatera Barat, memiliki potensi pariwisata yang besar terutama di sektor wisata bahari, wisata budaya, dan kuliner.

**Gambar 1. 2**  
**Grafik Jumlah Destinasi Wisata Berdasarkan Jenis Di Kota Padang**  
**Tahun 2023**



*Sumber: Kota Padang dalam Angka 2024*

Berdasarkan Grafik 1.2, dapat diketahui bahwa wisata alam menjadi jumlah destinasi paling banyak, hal ini menunjukkan potensi besar Kota Padang dalam menawarkan keindahan alam kepada para wisatawan. Selain wisata alam, wisata bahari dan kuliner juga cukup diminati. Tingginya jumlah destinasi ini menunjukkan bahwa Kota Padang memiliki beragam pilihan wisata yang bisa menarik minat wisatawan dengan berbagai referensi. Dari grafik 1.2 dapat disimpulkan bahwa Kota

Padang memiliki potensi besar dalam mengembangkan sektor pariwisata dengan beragam jenis destinasi wisata yang ditawarkan.

Pemerintah Kota Padang setiap tahunnya melakukan perubahan pada perencanaan pengembangan sektor pariwisata di Kota Padang. Pada tahun 2023 dibuat rancangan berisikan lima strategi utama, diantaranya: Pertama, dilakukan pengembangan Daerah Tujuan Wisata (DTW) dengan menata kembali destinasi unggulan seperti Pantai Padang, Gunung Padang, dan kawasan wisata bahari lainnya, serta meningkatkan fasilitas untuk memberikan kenyamanan lebih bagi wisatawan. Kedua, penguatan konsep pariwisata halal dan wisata berbasis Masyarakat dengan menerapkan standar Global Muslim Travel Index (GMTI) dan meningkatkan keterlibatan komunitas lokal dalam pengelolaan destinasi. Ketiga, digitalisasi dan pemasaran wisata dengan pengembangan aplikasi digital yang menghubungkan wisatawan dengan penyedia layanan wisata, serta optimalisasi strategi promosi melalui media digital. Keempat, peningkatan sarana dan prasarana pendukung dengan penyediaan layanan kesehatan, akomodasi, serta pengembangan konsep pariwisata massal yang lebih tertata. Kelima, kerja sama dan kemitraan dengan sektor swasta, investor, serta komunitas diperkuat untuk mendukung pertumbuhan pariwisata, termasuk mengembangkan potensi wisata berbasis MICE (*Meeting, Incentive, Convention, and Exhibition*).

Meskipun memiliki potensi yang besar, pengelolaan sektor pariwisata Kota Padang masih menghadapi sejumlah tantangan dan memerlukan perhatian khusus dari

pemerintah. Salah satu tantangan yang dihadapi adalah kurangnya dukungan pemerintah dalam mengelola sektor pariwisata secara berkelanjutan dan efektif. Sebagai contoh, fasilitas pendukung sektor pariwisata seperti jalan menuju destinasi wisata, akomodasi, dan fasilitas umum lainnya belum sepenuhnya memadai untuk pelaksanaan pengembangan yang telah dirancang. Selain itu, masih terdapat keterbatasan dalam koordinasi antar masing-masing instansi terkait dalam pengembangan pariwisata.<sup>8</sup>

Tantangan lain yang dihadapi Pemerintah Kota Padang adalah pandemi Covid-19 yang sempat membuat turunnya angka kunjungan wisata. Namun, dalam data yang rangkum oleh BPS Kota Padang, jumlah wisatawan mengalami peningkatan dari tahun ke tahun seperti yang terdapat pada Tabel 1.5.

**Tabel 1. 5**  
**Data Jumlah Kunjungan Wisatawan Mancanegara dan Domestik di Kota Padang 2019-2024**

Tahun	Wisatawan		Total pengunjung
	M mancanegara	Domestik	
2019	88.351	5.384.236	5.472.587
2020	21.660	2.562.966	2.584.626
2021	1.538	1.000.732	1.002.270
2022	22.995	2.832.140	2.855.135
2023	455.698	3.702.838	4.158.536
2024	191.632	5.455.685	5.647.317

*Sumber: Dinas Pariwisata Kota Padang 2025*

<sup>8</sup> Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Indonesia, “Rencana Pembangunan Pariwisata Daerah,” 2022

Tabel 1.5 secara umum menunjukkan jumlah wisatawan domestik dan mancanegara mengalami peningkatan dari tahun ke tahun, kecuali penurunan pada tahun 2021 yang dipengaruhi oleh pandemi Covid-19. Namun, wisatawan domestik memberikan kontribusi yang jauh lebih besar dibandingkan wisatawan mancanegara terhadap total kunjungan wisatawan. Data jumlah wisatawan Kota Padang dari tahun 2019 hingga 2024 mengalami fluktuasi akibat pandemi Covid-19.

Tahun 2019 menunjukkan data pengunjung sebesar 5,47 juta pengunjung, tetapi jumlah ini turun drastis pada tahun 2020 dan 2021 menjadi 2,58 juta dan 1 juta akibat pembatasan perjalanan. Mulai tahun 2022, total jumlah pengunjung Kembali meningkat dengan jumlah total 2,85 juta wisatawan, hal ini didukung oleh pelonggaran kebijakan perjalanan. Pada tahun 2023 terjadi lonjakan signifikan dengan total 4,15 juta pengunjung, terutama wisatawan mancanegara yang meningkat drastis menjadi 455 ribu orang. Pada tahun 2024, jumlah wisatawan mencapai 5,64 juta, melampaui angka sebelum pandemi Covid-19. Pemulihan ini mencerminkan keberhasilan strategi pengembangan wisata yang menjadikan Kota Padang sebagai salah satu destinasi unggulan di Indonesia.

Jumlah kunjungan wisatawan dapat mempengaruhi besarnya pendapatan asli daerah Kota Padang. Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Padang terjadi karena meningkatnya kualitas industri pariwisata dan bertambahnya jumlah wisatawan domestik maupun wisatawan mancanegara yang mempengaruhi

peningkatan PAD sektor pariwisata Kota Padang.<sup>9</sup> Peningkatan PAD sektor pariwisata Kota Padang dapat dilihat pada Tabel 1.6.

**Tabel 1. 6**

**Penerimaan PAD Sektor Pariwisata Kota Padang Tahun 2019-2024**

No	PAD	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	Retribusi	2.742.35	1.427.7	111.400	237.733.	387.309.	586.384.
	Objek Wisata	4.266	91.448	.686	363	250	647
2	Pajak Hotel	41.246.2	21.070.	27.612.	48.79.25	56.75.39	57.877.2
		73.620	809.433	092.250	0.010	9.590	05.058
3	Pajak Restoran	51.140.8	35.147.	43.241.	62.112.9	70.69.47	72.147.7
		36.591	316.035	010.686	27.431	1.732	76.720
4	Pajak Hiburan	9.860.36	3.805.1	2.883.7	7.175.64	9.015.62	9.601.93
		0.021	01.995	90.044	6.608	3.836	0.281
Total		104.989.	61.451.	73.848.	118.235.	136.788.	140.213.
		824.498	018.911	293.666	557.412	804.408	296.706

*Sumber: Olahan peneliti dari Dinas Pariwisata Kota Padang tahun 2025*

Berdasarkan Tabel 1.6 dapat diketahui bahwa PAD sektor pariwisata Kota Padang tahun 2020 mengalami penurunan, jika dibandingkan dengan PAD pada tahun 2019. Berkurangnya transaksi di hotel dan restoran selama masa pandemi Covid-19 menjadi faktor utama penyebab penurunan PAD sektor pariwisata, karena berkurangnya jumlah wisatawan yang berkunjung ke Kota Padang.<sup>10</sup>

Untuk tahun 2023 pajak restoran menjadi penyumbang PAD terbesar dari sektor pariwisata yakni sebesar Rp70,6 miliar, atau mencapai 100,87%. Selanjutnya dari pajak hotel mencapai Rp56,7 miliar atau 1003,26%, kemudian disusul pajak

<sup>9</sup> Novia Lestari dan Idris, op.cit, hal 64.

<sup>10</sup> LAKIP Dinas Pariwisata Kota Padang 2020

hiburan sebesar Rp9 miliar atau 112%. Sementara untuk retribusi wisata Gunung Padang dan Pantai Padang berhasil terkumpul sebesar Rp378.309.200.<sup>11</sup>

Meningkatnya PAD sektor wisata terjadi karena adanya keterlibatan Pemerintah Daerah Kota Padang yang sudah memiliki kapasitas pemerintah dalam mengelola sektor pariwisata. Kapasitas pemerintah menjadi faktor penting yang mempengaruhi kualitas dan keberlanjutan pariwisata di Kota Padang. Dalam konteks ini, kapasitas pemerintah dibagi menjadi beberapa dimensi utama, yaitu kapasitas infrastruktur, kapasitas sumber daya manusia, kapasitas keuangan dan manajerial, serta kapasitas lingkungan eksternal.

Abadi selaku Perencana Ahli Muda di bidang program Dinas Pariwisata Kota Padang ketika di wawancarai pada tanggal 12 Desember 2024, mengatakan bahwa:

“...Dalam rangka mendukung pelaksanaan pengembangan yang telah direncanakan, kita memerlukan alokasi dana yang memadai guna merealisasikan program yang sudah disusun secara optimal. Selama tiga tahun terakhir, rancangan Master Plan dan Detail Engineering Design (DED) digunakan sebagai upaya untuk meningkatkan sektor pariwisata Kota Padang. Selain bekerja sama dengan pemerintah, kita juga menjalin kemitraan dengan pihak swasta, seperti PT. Semen Padang. Dalam hal penyebarluasan informasi, kita menggunakan sarana digitalisasi, dengan memanfaatkan platform digital termasuk situs web dan aplikasi untuk meningkatkan jangkauan promosi. Selain itu, kita juga memiliki tenaga kerja yang kompeten di bidangnya masing-masing, yang mendukung implementasi rencana pengembangan pariwisata yang telah disusun.”

---

<sup>11</sup> Adiyansyah Lubis, “Rp100 Miliar lebih PAD Kota Padang 2023 Disumbang Sektor Pariwisata”, Radarsumbar, diakses dari <https://radarsumbar.com/sumbar/padang/95583/rp100-miliar-lebih-pad-kota-padang-2023-disumbang-sektor-pariwisata/2>

Dari wawancara yang telah dilaksanakan, ditemukan bahwa pengembangan kapasitas pemerintah daerah Kota Padang membutuhkan infrastruktur yang memadai, sumber daya manusia yang kompeten, sumber daya keuangan dan sistem manajemen yang baik, serta jaringan kerjasama untuk memperluas jangkauan dan meningkatkan efektivitas program pengembangan.

Pengembangan pariwisata menjadi prioritas pembangunan nasional sejalan dengan visi pemerintah yang tercantum dalam kebijakan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) untuk menjadikan Indonesia sebagai salah satu destinasi wisata unggulan dunia. Arah kebijakan ini diteruskan ke daerah melalui RPJMD. Pemerintah Daerah Kota Padang, juga menjadikan sektor pariwisata sebagai salah satu fokus utama dalam RPJMD Kota Padang Tahun 2019-2024. Oleh karena itu penelitian tentang Kapasitas Pemerintah Daerah Kota Padang dalam Pengembangan Sektor Pariwisata menjadi sangat relevan, baik secara akademis maupun praktis.

Dalam upaya pengembangan sektor pariwisata, diperlukan koordinasi antar Organisasi Perangkat Daerah (OPD) sebagai kunci keberhasilan dalam menciptakan kebijakan yang efektif dan berkelanjutan. Setiap OPD memiliki peran strategis dalam mendukung sektor pariwisata sesuai dengan tugas dan kewenangannya. Beberapa OPD yang terlibat langsung dan paling dominan dalam perencanaan pengembangan sektor wisata diantaranya, Dinas Pariwisata Kota Padang, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda), Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

(PUPR), Dinas Lingkungan Hidup (DLH), dan Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Padang.

Dinas Pariwisata Kota Padang berperan sebagai lembaga utama yang menangani pengembangan, promosi, serta penyelenggaraan kegiatan pariwisata di Kota Padang. Dinas pariwisata bertanggung jawab atas promosi, pengembangan, dan penyelenggaraan berbagai kegiatan pariwisata di Kota Padang yang dimuat dalam program strategis Kota Padang. Program ini bertujuan untuk meningkatkan daya tarik wisata dan memastikan sektor pariwisata berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi daerah.

Bappeda memiliki peran penting dalam menyusun strategi pembangunan berbasis pariwisata yang berintegrasi dengan kebijakan pembangunan daerah. Strategi ini termuat dalam RPJMD Kota Padang. Potensi wisata Kota Padang dapat dioptimalkan oleh Bappeda melalui penyusunan Rencana Strategis (Renstra) yang baik.

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) bertanggung jawab dalam pembangunan serta perbaikan fasilitas pendukung pariwisata, seperti akses jalan menuju destinasi wisata, sarana umum, dan pengembangan kawasan wisata agar lebih nyaman bagi pengunjung. Kemudian, Dinas PUPR memastikan sistem transportasi yang memadai dan aksesibilitas yang baik bagi wisatawan, baik dari dalam maupun luar daerah.

Dinas Lingkungan Hidup (DLH) bertanggung jawab dalam menjaga kelestarian kawasan wisata dan memastikan pengelolaan limbah yang berkelanjutan. Dengan meningkatnya jumlah wisatawan, pengelolaan lingkungan yang baik menjadi faktor penting dalam menjaga daya dukung destinasi wisata agar tetap menarik dan nyaman bagi pengunjung.

Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Padang memegang peranan sentral dalam mengkoordinasikan kebijakan lintas perangkat daerah, termasuk dalam hal pengembangan sektor pariwisata. Sebagai pimpinan tertinggi dalam struktur administratif pemerintah daerah setelah Wali Kota, Sekda memastikan sinergi antar dinas berjalan secara efektif, baik dalam perencanaan strategis, alokasi anggaran, maupun implementasi program yang mendukung pariwisata berkelanjutan. Sekda juga berperan dalam mendorong integrasi kebijakan pariwisata dengan isu-isu prioritas lain seperti pelestarian budaya, pembangunan infrastruktur, dan peningkatan kualitas layanan publik, sehingga kebijakan yang dihasilkan mampu menjawab tantangan secara menyeluruh dan berkelanjutan.

Dengan adanya sinergi antar OPD, diharapkan pengembangan sektor pariwisata di Kota Padang dapat berjalan lebih optimal, terintegrasi, dan berkelanjutan, sehingga mampu memberikan manfaat ekonomi sekaligus menjaga keberlanjutan lingkungan dan budaya lokal.

Menurut teori kapasitas organisasi yang ditemukan oleh Christensen dan Gazley (2008), kapasitas organisasi berhubungan dengan infrastruktur yang tersedia,

sumber daya manusia, sumber daya keuangan dan manajerial, serta lingkungan eksternal.<sup>12</sup>

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis lebih dalam faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan pengembangan destinasi wisata di Kota Padang, dengan mengatasi masalah pada kapasitas Pemerintah Daerah Kota Padang dalam mengelola sumber daya manusia, keuangan, sistem organisasi, jaringan antar lembaga, dan destinasi wisata itu sendiri. Penelitian ini mengadopsi kerangka kerja kapasitas organisasi yang dikembangkan oleh Christensen dan Gazley (2008). Kerangka ini sangat relevan karena menekankan pada pentingnya infrastruktur, sumberdaya manusia, sumberdaya keuangan, dan lingkungan eksternal dalam mendukung pengembangan organisasi.

Selain itu, kajian ini akan berkontribusi dalam memberikan rekomendasi praktis bagi pemerintah daerah untuk meningkatkan pengelolaan pariwisata yang berkelanjutan. Dengan potensi dan tantangan yang ada, penelitian ini diharap bisa menjadi referensi bagi pengambilan kebijakan, khususnya dalam meningkatkan daya saing pariwisata Kota Padang di tingkat nasional maupun internasional. Peneliti merupakan instrumen utama penelitian. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara, observasi dan dokumentasi. Unit analisis dalam penelitian ini adalah Pemerintah Daerah Kota Padang.

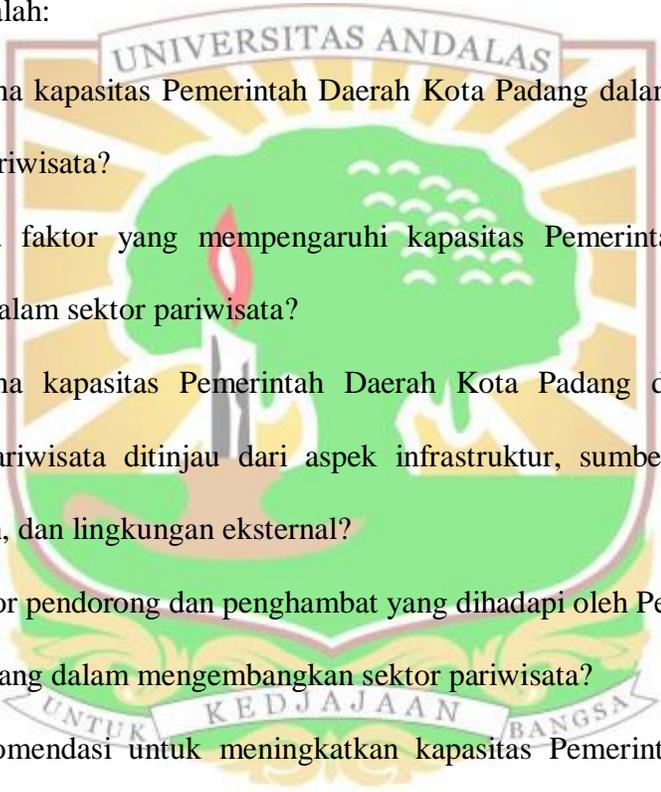
---

<sup>12</sup> Christensen, R.K., & Gazley, B “Capacity Building in Public Manajement,” Public Adminstration Review, 2008

Berdasarkan uraian diatas, maka peneliti ingin melihat bagaimana kapasitas Pemerintah Daerah Kota Padang dalam melakukan pengembangan di bidang pariwisata.

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

- 
- a. Bagaimana kapasitas Pemerintah Daerah Kota Padang dalam pengembangan sektor pariwisata?
  - b. Apa saja faktor yang mempengaruhi kapasitas Pemerintah Daerah Kota Padang dalam sektor pariwisata?
  - c. Bagaimana kapasitas Pemerintah Daerah Kota Padang dalam mengelola sektor pariwisata ditinjau dari aspek infrastruktur, sumber daya manusia, keuangan, dan lingkungan eksternal?
  - d. Apa faktor pendorong dan penghambat yang dihadapi oleh Pemerintah Daerah Kota Padang dalam mengembangkan sektor pariwisata?
  - e. Apa rekomendasi untuk meningkatkan kapasitas Pemerintah Daerah Kota Padang dalam sektor pariwisata?

## **1.3 Tujuan Penelitian**

Penelitian ini bertujuan untuk:

- a. Menilai kapasitas Pemerintah Daerah Kota Padang dalam mengembangkan sektor pariwisata.

- b. Menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi kapasitas Pemerintah Daerah Kota Padang dalam sektor pariwisata.
- c. Mengidentifikasi dimensi kapasitas infrastruktur, sumberdaya manusia, sumberdaya keuangan dan lingkungan eksternal dalam pengelolaan pariwisata.
- d. Memberikan rekomendasi untuk meningkatkan kapasitas Pemerintah Daerah Kota Padang dalam pengelolaan sektor pariwisata.

#### **1.4 Manfaat Penelitian**

##### 1.4.1. Manfaat teoritis

- a. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam kajian ilmu administrasi publik terkait Kapasitas Pemerintah Daerah dalam Pengembangan Sektor Pariwisata di Kota Padang.
- b. Sebagai pertimbangan dan rujukan bagi peneliti selanjutnya tentang Kapasitas Pemerintah Daerah dalam Pengembangan Sektor Pariwisata di Kota Padang.

##### 1.4.2 Manfaat praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi berbagai pihak, antara lain:

- a. Bagi Pemerintah Daerah Kota Padang, penelitian ini memberikan rekomendasi yang dapat digunakan untuk meningkatkan kapasitas

pengelolaan sektor pariwisata, baik dari sisi infrastruktur, sumberdaya manusia, sumberdaya keuangan dan lingkungan eksternal.

- b. Bagi akademisi, penelitian ini menjadi referensi penelitian lebih lanjut mengenai kapasitas organisasi dalam pengelolaan pariwisata, serta menambah wawasan terkait kebijakan pembangunan pariwisata daerah.
- c. Bagi praktisi pariwisata, penelitian ini memberikan panduan bagi praktisi wisata dan sektor wisata dalam merencanakan dan mengembangkan potensi pariwisata di Kota Padang.
- d. Bagi masyarakat lokal, penelitian ini memberikan pemahaman tentang pentingnya pemberdayaan masyarakat dalam sektor pariwisata dan bagaimana mereka dapat berkontribusi dalam pengelolaan destinasi wisata.

